

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan bermanfaat bagi investor karena dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan bisnis dan ekonomik. Kualitas pengambilan keputusan meningkat apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan dalam mengambil keputusan. Hal ini hanya dapat tercapai apabila angka-angka yang tersaji merefleksikan dengan baik semua peristiwa ekonomi yang dialami perusahaan sehingga pihak-pihak di luar perusahaan mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya serta prospek perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menentukan kualitas pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan produk dari sistem akuntansi berbasis akrual. Akuntansi akrual mengharuskan manajer menggunakan diskresi dalam mengestimasi nilai transaksi-transaksi yang penyelesaiannya tergantung keadaan yang terjadi di masa depan. Akibatnya, kesalahan-kesalahan estimasi, baik disengaja maupun yang tidak, menjadi sesuatu yang tidak terelakkan dan inheren dalam proses pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam melaporkan pos-pos akrual dan tercermin dari kualitas komponen akrual yang terkandung dalam laba yang dilaporkan. Kualitas akrual mengacu pada ketepatan

estimasi akuntansi yang digunakan dalam mencatat seluruh transaksi atau peristiwa ekonomi yang dialami perusahaan (Dechow dan Dichev (2002).

Menurut Dechow dan Dichev (2002), kualitas akrual tercermin dari hubungan antara *working capital accrual* dan *operating cash flow* perusahaan. Lebih jauh dikatakan bahwa *working capital accrual* periode berjalan merupakan fungsi dari realisasi arus kas masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Pada kondisi yang ideal, perubahan *working capital accrual* seharusnya akan sebanding (*matching*) dengan perubahan *operating cash flow*. Sebaliknya perubahan *working capital accrual* yang tidak proporsional dengan perubahan *operating cash flow* menunjukkan adanya kesalahan estimasi yang digunakan dalam mencatat transaksi laporan keuangan. Kesalahan estimasi dalam pencatatan laporan keuangan menentukan tingkat kualitas akrual dan kualitas laporan keuangan. Semakin banyak kesalahan estimasi, maka semakin rendah kualitas akrual dan semakin rendah pula kualitas laba yang dilaporkan perusahaan. Sebaliknya ketika semakin sedikit kesalahan estimasi pada pencatatan transaksi-transaksi yang ada, maka kualitas laporan keuangan menjadi semakin meningkat karena mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya.

Sebagai contoh, perusahaan melakukan penjualan secara kredit sebesar 100 rupiah pada periode  $t$ , perusahaan akan mengakui adanya piutang terhadap pendapatan penjualan sebesar 100 rupiah, dengan estimasi bahwa besar kemungkinan piutang ini akan dilunasi seluruhnya pada periode berikutnya ( $t+1$ ). Ketika pada periode  $t+1$  pelunasan piutang hanya sebesar 70 rupiah, maka pada laporan keuangan arus kas bertambah hanya sebesar 70 rupiah sedangkan piutang telah bertambah

sebesar 100 rupiah. Ini menyebabkan sebesar 30 rupiah (selisih antara estimasi akrual dengan realisasi arus kas) terdeteksi sebagai *error* atau kesalahan estimasi. Pada kondisi ini berarti pengakuan piutang sebesar 100 rupiah yang telah dilakukan tidak tepat karena piutang sebagai komponen dari *working capital* tidak terealisasi seluruhnya pada arus kas periode berikutnya. Sebaliknya, ketika terdapat pelunasan piutang sebesar 100 rupiah pada periode  $t+1$ , maka tidak ada *error* yang ditemukan karena estimasi akrual yang telah dibuat periode sebelumnya sama dengan realisasi arus kas pada periode berikutnya, ini berarti bahwa pengakuan akrual menggunakan estimasi yang tepat dan menunjukkan akrual yang berkualitas (Dechow dan Dichev, 2002).

Penelitian Dechow dan Dichev (1994) menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dapat merefleksikan kinerja perusahaan jangka pendek dengan lebih baik. Ini karena melalui pencatatan akrual, transaksi yang tidak melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dapat dicatat terlebih dahulu selama transaksi ini memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Seperti pada contoh kasus di atas, perusahaan dapat mengakui adanya pendapatan terlebih dahulu sebelum menerima kas dengan asumsi bahwa besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh kas tersebut di masa berikutnya. Ini membuat laba dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan mencerminkan implikasi ekonomi masa depan melalui transaksi yang terjadi saat ini.

Auditor eksternal berperan penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa pengauditan yang diberikan,

Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pada tahun 2008 yang membatasi masa pemberian jasa audit oleh kantor akuntan publik. Pasal 3 menyatakan bahwa masa perikatan antara klien dengan KAP paling lama adalah enam tahun berturut-turut dan antara klien dengan akuntan publik paling lama tiga tahun berturut-turut.

Pada tahun 2011, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 yang juga mengatur jasa akuntan publik. Pasal 4 pada peraturan tersebut tertulis bahwa lamanya masa pemberian jasa audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan historis perusahaan klien dibatasi oleh jangka waktu tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang ini tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai lamanya masa penugasan audit. Oleh karena itu, penelitian ini tetap menggunakan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pada tahun 2008 yang memberikan penjelasan secara detail mengenai lamanya masa penugasan jasa audit. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman yang jelas untuk mengatur akuntan publik dalam memberikan jasa pengauditan mereka.

Peneliti sebelumnya yaitu Siregar dkk. (2011) menguji apakah peraturan rotasi kantor akuntan publik dan akuntan publik meningkatkan kualitas audit serta menguji pengaruh rotasi kantor akuntan publik dan akuntan publik terhadap kualitas audit sebelum dan sesudah adanya peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Siregar dkk. (2011) menduga bahwa semakin lama masa penugasan kantor akuntan publik dan akuntan publik, maka kualitas audit akan

meningkat sebelum mencapai jangka waktu optimal dan sebaliknya kualitas audit akan menurun setelah mencapai jangka waktu optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa penugasan audit yang lama akan menurunkan kualitas audit. Peneliti juga menemukan bahwa dengan adanya rotasi auditor maka kualitas audit akan menurun. Sehingga menurut peneliti perlu adanya evaluasi terhadap peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji apakah peraturan mengenai lamanya masa penugasan kantor akuntan publik berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pada tahun 2008 berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik. Setelah peraturan ini diterbitkan tahun 2008 kualitas laporan keuangan perusahaan publik diekspektasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelum terbitnya peraturan tersebut.

Di samping auditor eksternal, komite audit juga berperan penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Salah satu fungsi komite audit adalah memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku sebelum laporan keuangan ini dipublikasikan oleh perusahaan agar laporan keuangan menggambarkan realitas ekonomi yang dialami perusahaan. Komite audit harus menjalin komunikasi yang baik dengan akuntan publik dan manajemen serta dewan komisaris untuk membahas masalah dan temuan audit mengenai laporan keuangan. Pada umumnya, peran komite audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan diukur menggunakan latar belakang pendidikan komite audit. Namun menurut Badolato (2014), komite audit yang memiliki pengalaman sebagai direksi perusahaan publik

atau swasta dapat meningkatkan fungsi pengawasan komite audit. Pengalaman sebagai direksi memberikan pengetahuan bagi komite audit dalam menjalankan bisnis, mengambil keputusan ekonomi, memimpin dan menjalin relasi yang baik dengan karyawan. Komite audit yang memiliki pengalaman tersebut disebut sebagai komite audit yang memiliki status. Menurut D'Aveni (1990), peran komite audit yang memiliki status dapat meningkatkan efektivitas proses pelaporan keuangan, karena status membuat manajer melihat komite audit lebih berwibawa dan memiliki kompetensi yang tinggi. Selain itu, komite audit yang memiliki status akan lebih aktif dalam melakukan pengawasan, memperoleh informasi yang lebih komprehensif, dan bersedia menyelidiki kemungkinan masalah yang mungkin muncul. Kedua hal ini menjadi alasan mengapa status komite audit diduga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui efektivitas pengawasan yang diberikan.

Hasil penelitian Badolato *et al.* (2014) menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan mampu membatasi tindakan manajemen laba. Namun beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Abbott *et al.* (2002) menyimpulkan bahwa komite audit dengan keahlian di bidang keuangan diperlukan untuk memperkuat fungsi pemantauan proses pelaporan keuangan. Xie *et al.* (2003) juga menemukan bahwa komite audit yang memiliki latar belakang keuangan akan menurunkan manajemen laba. Sementara studi yang dilakukan oleh Prastiti dan Meiranto (2013); Pamudji dan Trihartati (2010); Dhaliwal *et al.* (2006) menemukan keahlian komite audit di bidang keuangan tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil-

hasil yang tidak konsisten tersebut kemungkinan disebabkan oleh status para anggota komite dalam pekerjaan sebelumnya. Karena itu, penelitian ini menduga bahwa interaksi antara latar belakang akuntansi atau keuangan dan status yang dimiliki komite audit dapat mempengaruhi kualitas laporan.

Badolato *et al.* (2014) menguji pengaruh interaksi antara status dan latar belakang yang dimiliki komite audit terhadap kesalahan atau iregularitas laporan keuangan menggunakan perusahaan yang ada di Amerika sebagai sampel penelitian. Oleh karena model interaksi antara variabel status dan latar belakang komite audit sebelumnya belum pernah diteliti di Indonesia, maka penelitian ini menguji pengaruh interaksi status dan latar belakang komite audit terhadap kualitas laporan keuangan yang diukur dengan kualitas akrual dan menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian.

Ukuran kantor akuntan publik menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang diberikan. KAP *Big Four* dipercaya mampu memberikan jasa audit laporan keuangan secara independen dan profesional sehingga memiliki reputasi dan kualitas audit yang tinggi. Myers *et al.* (2003) menyatakan bahwa audit *Big Four* lebih dapat membatasi *discretionary accruals* manajemen yang berlebihan dibanding dengan audit *non-Big Four*. Menurut Asare dan Abdolmohammadi (2015), *discretionary accruals* dan *restatement* dapat terjadi sebagai akibat dari adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Ini berarti *discretionary accruals* yang rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan kecurangan laporan keuangan sebagai indikasi dari kualitas laporan keuangan.

Keberadaan dewan komisaris independen dan investor institusi yang kuat merupakan bagian dari mekanisme GCG. Menurut Fama dan Jensen (1983), pengawasan yang efektif dari dewan komisaris independen dapat membatasi kepentingan manajemen dan mengurangi *agency costs* sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Lebih jauh lagi, dewan komisaris independen dapat menurunkan kecenderungan manajer untuk mempengaruhi proses pelaporan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sementara, Chung *et al.* (2005), menyatakan investor institusional akan lebih aktif dan termotivasi untuk melakukan pengawasan ketika investor institusional memiliki tingkat kepemilikan saham yang tinggi. Velury dan Jenkins (2006) memberikan bukti bahwa investor institusional dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya peran status yang dimiliki komite audit dan dampak regulasi perikatan akuntan publik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **PERAN STATUS KOMITE AUDIT, REGULASI PERIKATAN AKUNTAN PUBLIK, INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**”.



## 1.2. Perumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas:

1. Apakah kualitas laporan keuangan lebih tinggi setelah peraturan tentang masa penugasan audit dikeluarkan tahun 2008 dibanding kualitas laporan keuangan sebelum peraturan tersebut dikeluarkan?
2. Apakah interaksi antara status komite audit dan latar belakang akuntansi atau keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kualitas laporan keuangan perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP *Big Four* lebih tinggi daripada kualitas laporan keuangan perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP *non-Big Four*?
4. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah kepemilikan investor institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa :

1. Kualitas laporan keuangan lebih tinggi setelah peraturan tentang masa penugasan audit dikeluarkan tahun 2008 dibanding kualitas laporan keuangan sebelum peraturan tersebut dikeluarkan.

2. Interaksi antara status komite audit dan latar belakang akuntansi atau keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Kualitas laporan keuangan perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP *Big Four* lebih tinggi daripada kualitas laporan keuangan perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP *non-Big Four*.
4. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Kepemilikan investor institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris bahwa peraturan masa pemberian jasa audit, interaksi antara status komite audit dan latar belakang keuangan dan akuntansi komite audit, kualitas audit, independensi dewan komisaris, dan kepemilikan investor institusional sebagai mekanisme *corporate governance* dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

##### **1.4.2. Bagi Praktisi**

Studi ini bermanfaat bagi investor atau calon investor yang menggunakan informasi laporan keuangan dalam menganalisa kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan. Analisa ini perlu dilakukan sehingga investor dapat memilih perusahaan

yang tepat sebelum mereka melakukan investasi pada suatu perusahaan. Maka setiap keputusan investor harus diambil berdasarkan pada informasi laporan keuangan yang berkualitas dan relevan. Penelitian ini menduga bahwa peran komite audit, kantor akuntan publik, dewan komisaris independen, dan investor institusional yang merupakan mekanisme *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat membantu investor dan calon investor untuk menilai kualitas laporan keuangan melalui indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komite audit, kantor akuntan publik, dewan komisaris independen, dan investor institusional sebagai mekanisme *corporate governance*.

Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris untuk memperkuat kembali teori empiris yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pengujian ulang terhadap variabel penelitian dan perbaikan penelitian.

## 1.5. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

